KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tak Ada yang Salah dengan Jokowi
Tanggal : Selasa, 13 Januari 2015
Surat Kabar : Republika
Halaman : 1

Tak Ada yang Salah dengan Jokowi

■ Ira Sasmita

Ketua DPR Setya Novanto enggan mempermasalahkan perihal pemilihan calon Kapolri baru tanpa melalui pertimbangan KPK dan PPATK. Menurutnya, dalam hal ini presiden telah menggunakan kewenangan sebagaimana mestinya.

"Pemilihan, penunjukan ini hak prerogatif presiden. Kita hargai, tentu kita dukung surat Bapak Presiden untuk ditindaklanjuti," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (12/1).

Mengenai isu yang mengaitkan Budi Gunawan dengan masalah rekening gendut, menurut Setya, itu wewenang pemerintah untuk menelaah sejauh mana keterlibatan perwira tersebut. Dalam hal ini, dia mengatakan DPR juga tidak berwenang untuk merekomendasikan apakah KPK dan PPATK harus terlibat atau tidak dalam memilih yang bersangkutan. "Itu *udah* wewenang pemerintah, kita *nggak* berkaitan," ujarnya.

Dia kemudian menjelaskan apa yang akan dilakukan DPR dalam menindaklanjuti surat Presiden tersebut. Menurutnya, surat tersebut akan dibahas di Bamus, lalu ke Komisi III untuk melaksanakan tes kepatutan dan kelayakan Budi untuk menjadi Kapolri.

Saat di Komisi III, *fit and proper test*-nya berupa penyebutan visi-misi dan sejumlah pertanyaan akan diajukan DPR untuk melihat sejauh mana komitmen Budi dalam memimpin Polri nantinya. Termasuk menelaah rekam jejak dan aktivitas sosial yang bersangkutan baik di masyarakat maupun keluarga.

Politikus PDI Perjuangan Pramono Anung menilai Jokowi telah mempertimbangkan semua hal sehingga memilih Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang baru. Di antaranya mengenai sisi profesional, kapasitas, serta rekam jejak selama menjadi perwira tinggi di kepolisian.

Perihal posisi Budi yang pernah menjabat sebagai ajudan Megawati saat menjadi presiden, kata Pramono, tidak ada yang salah dalam hal ini. Sebab, menurutnya, seharusnya penunjukan dilihat juga dari profil Budi yang pernah menjadi lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) dan sejumlah prestasi lainnya. "Apakah ajudan lulusan terbaik, dijadikan Kapolri salah?" katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan Budi sudah memenuhi syarat menjadi Kapolri. Pasalnya, selain menjadi calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden, Budi juga telah mendapat rekomendasi dari Kompolnas. "Dua syarat ini cukup bagi Budi Gunawan menjadi Kapolri. Tinggal dia siap dites atau tidak oleh Komisi III DPR," ujar politikus Partai Gerindra ini.

■ c89 **ed:** muhammad hafil